

SBY: "This is My War", Perang untuk Keadilan!

<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/16434321/sby-this-is-my-war-perang-untuk-keadilan>

Estu Suryowati

Kompas.com - 06/02/2018, 16:43 WIB



Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2/2018). (ESTU SURYOWATI/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menempuh langkah hukum atas proses hukum yang berkembang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

SBY merasa difitnah atas tuduhan melakukan intervensi dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat presiden.

"Tidak pernah namanya SBY ikut-ikutan ngurusi proyek, melakukan intervensi atas proyek," kata SBY dalam jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (8/2/2018).

Saat itu, SBY didampingi istrinya, Ani Yudhoyono; putranya, Agus Harimurti dan Edhi Baskoro (Ibas); Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan; dan para pengurus dan kader Demokrat dari sejumlah daerah.

(Baca juga: [Merasa Difitnah, SBY Akan Laporkan Pengacara Novanto ke Bareskrim](#))

SBY menegaskan tidak pernah ada penyimpangan proyek e-KTP yang dilaporkan kepadanya selama menjabat presiden.

Setelah namanya muncul dalam persidangan kasus e-KTP, SBY mengaku meminta penjelasan soal proyek e-KTP kepada para mantan pembantunya.

SBY telah bertemu mantan Menko Polhukam, mantan Mendagri, mantan Jaksa Agung, mantan Mensesneg, mantan Sekretaris Kabinet, dan mantan Menko Perekonomian.

Pasalnya, ia mengaku tidak tahu dan tidak mau masuk wilayah teknis proyek.

"Semua menjelaskan, memberi testimoni," kata SBY.

(Baca juga: [SBY: Percakapan Firman Wijaya dengan Mirwan Amir Penuh Rekayasa](#))

Dalam jumpa pers tersebut, SBY kembali menceritakan berbagai tuduhan yang pernah diarahkan kepadanya.

SBY curhat pernah dituduh menggerakkan dan mendanai aksi massa terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama, dituduh menggerakkan orang melakukan pengeboman Istana. Kemudian curhat soal aksi demo sejumlah orang di depan rumahnya di Jakarta, hingga pernyataan mantan Ketua KPK Antazari Azhar yang menyudutkannya.

(Baca juga: [Kata SBY, Tak Ada Program Pemerintah yang Lebih Akuntabel daripada Proyek E-KTP](#))

Terkait kasus e-KTP ini, SBY merasa dirinya harus menempuh jalur hukum. Pasalnya, jika tidak melawan, dampaknya bisa membuat rakyat Indonesia percaya tuduhan tersebut.

Sebelum membuat laporan, SBY juga menyinggung keraguan para kader Demokrat bahwa polisi akan menindaklanjuti laporan nantinya. Pasalnya, laporan terhadap Antasari setahun lalu tidak jelas pengusutannya.

"Saya masih percaya kepada Kabareskrim, saya percaya Kapolri dan Presiden RI. Mudah-mudahan beliau-beliau mendengar suara hati saya untuk menindaklanjuti apa yang saya adukan nanti," kata SBY.

SBY juga mengaku mendapat permintaan dari pengurus Demokrat untuk ikut mendampingi membuat laporan. Namun, SBY menolaknya.

Begitu pula tawaran bantuan dari para mantan menteri. SBY mengaku ingin menghadapi tuduhan tersebut seorang diri.

"Ini perang saya, *this is my war*. Perang untuk keadilan! Yang penting bantu saya dengan doa," kata SBY.

